

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 menjadi landasan hukum utama yang mengatur penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Dalam konteks ini, LAZIS Al-Haromain Bangkalan memiliki peran strategis dalam mengelola dana zakat di masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik pengelolaan dana zakat di LAZIS Al-Haromain menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas pendistribusian zakat kepada *mustahik*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap laporan pengelolaan dana zakat di LAZIS Al-Haromain Bangkalan, serta analisis komparatif terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011. Fokus analisis meliputi proses penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran dana zakat, serta kepatuhan LAZIS Al-Haromain terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi negara dalam praktik operasionalnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Al-Haromain Cabang Bangkalan secara umum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011. Lembaga ini telah berupaya menjalankan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat berdasarkan prinsip keadilan dan akuntabilitas, serta patuh pada syariat Islam. Namun, ditemukan beberapa aspek teknis yang memerlukan peningkatan, seperti belum optimalnya pemberian bukti setoran zakat otomatis kepada muzaki, penghimpunan zakat mal yang belum maksimal, dan adanya perbedaan pemahaman internal terkait tanggung jawab pemeliharaan dana. Meskipun demikian, secara keseluruhan, LAZIS Al-Haromain telah menunjukkan kepatuhan terhadap aspek legalitas, prosedur, dan prinsip syariah, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat di masa mendatang.

Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat, Undang-Undang, Fatwa MUI*

ABSTRACT

*This research is motivated by the importance of transparent and accountable zakat fund management in accordance with prevailing regulations in Indonesia. Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and MUI Fatwa Number 15 of 2011 serve as the primary legal foundations governing the collection, maintenance, and distribution of zakat assets. In this context, LAZIS Al-Haromain Bangkalan plays a strategic role in managing zakat funds within the community. Therefore, an analysis of zakat fund management practices at LAZIS Al-Haromain is crucial to ensure compliance with regulations and the effectiveness of zakat distribution to the *mustahik* (recipients).*

This study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data was obtained through document studies of zakat fund management reports at LAZIS Al-Haromain Bangkalan, as well as a comparative analysis against the provisions in Law Number 23 of 2011 and MUI Fatwa Number 15 of 2011. The focus of the analysis included the processes of zakat fund collection, maintenance, and distribution, as well as LAZIS Al-Haromain's compliance with sharia principles and state regulations in its operational practices.

The findings of this research indicate that the zakat fund management carried out by LAZIS Al-Haromain Bangkalan has generally complied with Law Number 23 of 2011 and MUI Fatwa Number 15 of 2011. The institution has endeavored to implement zakat collection, distribution, and utilization based on principles of justice and accountability, and adheres to Islamic sharia. However, some technical aspects were identified as needing improvement, such as the less-than-optimal provision of automatic zakat payment receipts to muzaki (donors), less than maximum collection of zakat mal, and internal differences in understanding regarding responsibility for fund maintenance. Nevertheless, overall, LAZIS Al-Haromain has demonstrated compliance with legal, procedural, and sharia principles, thus the results of this study are expected to provide input for improving the quality of zakat fund management in the future.

Keywords: Zakat Management, Law, MUI Fatwa